

Implementasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya

Rena Ratna Sari¹, Sadrina Yuanhar²

¹ Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Renaratna1122@gmail.com, sadrinayuanhar10@gmail.com

Keywords:

Village Fund
Policy
Implementation
Road Infrastructure
Rural Development
Community Welfare

Abstract: *This study aims to describe the implementation of Village Fund (Dana Desa) in road infrastructure development in Ciheras Village, Cipatujah District, Tasikmalaya Regency, particularly in Cisanggar Hamlet. Road infrastructure is a fundamental need for rural communities, directly affecting accessibility to health services, education, and economic activities. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with the Village Secretary of Ciheras, field observations, and documentation of the 2025 Village Budget (APBDes). The results indicate that the Village Fund allocation for Ciheras Village increased from IDR 2,100,476,000 to IDR 2,140,476,000 in 2025, with a total of IDR 416,551,200 allocated for road cementation at three locations. However, road repairs in Cisanggar Hamlet have not yet been realized and are scheduled for September 2026. Three main inhibiting factors were identified: internet network constraints in the online submission process, challenging geographical terrain that is difficult to access, and road lengths that exceed the available budget capacity. The impact of the unrealized road repair is felt by the community in three aspects: limited access to health services, hampered access to education, and high transportation costs that reduce household income. This study concludes that the implementation of Village Fund in Ciheras Village has been carried out in accordance with regulations, but still requires improvements in digital infrastructure capacity, cross-sector coordination, and strengthened budget allocation to ensure road construction can be implemented optimally and have a real impact on community welfare.*

Kata Kunci:

Dana Desa
Implementasi
Kebijakan
Infrastruktur Jalan
Pembangunan Desa
Kesejahteraan
Masyarakat

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Kampung Cisanggar. Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat desa yang berpengaruh terhadap aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa Ciheras, observasi lapangan, serta dokumentasi APBDes Tahun Anggaran 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa Ciheras mengalami peningkatan dari Rp2.100.476.000,00 menjadi Rp2.140.476.000,00 pada tahun 2025, dengan alokasi untuk semenisasi jalan di tiga titik lokasi senilai Rp416.551.200,00. Namun demikian, perbaikan jalan di Kampung Cisanggar belum terealisasi dan dijadwalkan pada bulan September 2026. Terdapat tiga faktor penghambat utama, yaitu kendala jaringan internet dalam proses pengajuan Dana Desa secara daring, kondisi*

geografis medan yang berat dan sulit diakses, serta panjang ruas jalan yang melebihi kapasitas anggaran yang tersedia. Dampak dari belum terlaksananya perbaikan jalan tersebut dirasakan masyarakat dalam tiga aspek, yakni terbatasnya akses kesehatan, terhambatnya akses pendidikan, serta tingginya biaya transportasi yang mengurangi pendapatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Dana Desa di Desa Ciheras telah berjalan sesuai regulasi, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas infrastruktur digital, koordinasi lintas sektor, dan penguatan alokasi anggaran agar pembangunan jalan dapat terlaksana secara optimal dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat

Kata kunci :

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Desa memiliki peran strategis sebagai pondasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan pemerintahan, sehingga pembangunan desa menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah dalam pembangunan desa adalah melalui pemberian Dana Desa, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu infrastruktur yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat desa adalah jalan. Infrastruktur jalan merupakan sarana utama yang menunjang mobilitas masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, mendistribusikan hasil pertanian, mengakses fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta memperlancar hubungan antarwilayah. Sebaliknya, kondisi jalan yang rusak dapat menghambat aktivitas masyarakat dan berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Di Kampung Cisanggar, Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, kondisi infrastruktur jalan masih menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat. Sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan aksesibilitas masyarakat menjadi terbatas, terutama dalam memperoleh pelayanan kesehatan, mengakses fasilitas pendidikan, serta menjalankan kegiatan ekonomi. Masyarakat kerap mengalami kesulitan dalam membawa hasil pertanian ke pasar, menjangkau fasilitas kesehatan, maupun melakukan mobilitas antarwilayah, terutama pada saat kondisi cuaca buruk.

Permasalahan infrastruktur jalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa masih memerlukan perhatian yang serius, terutama dalam pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan diharapkan mampu meningkatkan kualitas jalan desa sehingga aksesibilitas masyarakat dapat terwujud secara optimal. Dengan meningkatnya aksesibilitas, masyarakat akan lebih mudah memperoleh pelayanan publik, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Tinjauan Literatur

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam proses pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan ekonomi, sosial, serta penyediaan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan (Sibagariang, 2025). Desa memiliki kedudukan strategis sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan desa. Dalam perspektif administrasi publik, pembangunan desa dilaksanakan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah desa untuk

mengelola pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan desa adalah program Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan tersebut bertujuan mempercepat pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang merata dan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat desa. (Kemenkeu, 2021)

Pemanfaatan Dana Desa pada umumnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar desa, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, memperluas akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kondisi jalan desa yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penghubung sosial dan ekonomi antarwilayah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan [1].

Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur jalan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut George Edward III (1980) dalam (Kasmad, 2018), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten diperlukan agar tujuan kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Disposisi

atau komitmen pelaksana kebijakan serta struktur birokrasi yang terkoordinasi turut menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Nurpauziah, Djuwita, dan Layaman mengenai pengelolaan Dana Desa melalui pembangunan infrastruktur jalan di Desa Nanggela Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan secara partisipatif dan transparan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta memperkuat konektivitas ekonomi lokal (Nurpauziah & Djuwita, 2025). Penelitian tersebut menemukan bahwa tahapan pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui identifikasi masalah, perencanaan anggaran partisipatif, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban sehingga pembangunan jalan desa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki desa, tetapi juga dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan desa yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi faktor penting agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Jalan Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya menjadi penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan pembangunan jalan desa pada tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dengan menghadirkan analisis mengenai implementasi kebijakan pembangunan jalan desa, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, serta kontribusi pembangunan infrastruktur jalan terhadap peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Desa Ciheras.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan implementasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Cisanggar Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Informan penelitian terdiri dari aparatur desa, pelaksana pembangunan, dan masyarakat setempat yang mengetahui pelaksanaan pembangunan jalan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi infrastruktur jalan secara langsung. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Dana Desa dalam pembangunan jalan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti APBDes dan dokumen pembangunan desa.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai implementasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Kampung Cisanggar. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa Ciheras yang membidangi pengelolaan Dana Desa, yakni Bapak Rahmat, serta diperkuat dengan data dokumen APBDes Tahun Anggaran 2025. Pembahasan difokuskan pada empat aspek utama, yaitu kondisi infrastruktur jalan, realisasi anggaran Dana Desa, faktor penghambat implementasi, serta dampak yang dirasakan masyarakat.

1. Gambaran Umum Realisasi Dana Desa di Desa Ciheras Tahun 2025

Berdasarkan data APBDes Desa Ciheras Tahun Anggaran 2025, pemerintah desa memperoleh pendapatan yang bersumber dari berbagai sektor, meliputi

Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta bantuan keuangan lainnya. Total pendapatan Desa Ciheras mengalami peningkatan dari Rp2.161.476.000,00 menjadi Rp2.201.476.000,00, atau bertambah sebesar Rp40.000.000,00. Dana Desa menjadi sumber pendapatan terbesar dalam struktur APBDes, meningkat dari Rp2.100.476.000,00 menjadi Rp2.140.476.000,00.

Peningkatan kapasitas fiskal ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran pada program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam implementasinya, penggunaan Dana Desa di Desa Ciheras tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata, melainkan juga mencakup bidang pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, operasional pemerintah desa, serta kegiatan sosial lainnya. Pendekatan ini mencerminkan pembangunan desa yang bersifat holistik dan komprehensif sebagaimana diarahkan oleh kebijakan prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kampung Cisanggar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ciheras, diketahui bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kampung Cisanggar telah mengalami kerusakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jalan di wilayah tersebut terakhir kali mendapatkan perbaikan pada tahun 2013, sehingga sudah lebih dari satu dekade kondisinya terus memburuk tanpa adanya penanganan yang memadai.

"Jalan di Kampung Cisanggar memang sudah rusak bertahun-tahun. Terakhir diperbaiki itu tahun 2013, sudah lama sekali. Jadi kondisinya sekarang

memang sudah sangat perlu penanganan." (Bapak Rahmat, Sekretaris Desa Ciheras, 2026)

Kondisi jalan yang telah rusak selama lebih dari sepuluh tahun tersebut menggambarkan betapa mendesaknya kebutuhan perbaikan infrastruktur di Kampung Cisanggar. Kerusakan jalan yang berlangsung dalam waktu yang lama ini berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi sehari-hari.

Momentum perbaikan jalan di Kampung Cisanggar akhirnya muncul setelah adanya kunjungan langsung dari Bupati Tasikmalaya ke lokasi tersebut pada tahun sebelumnya. Kunjungan tersebut menjadi titik balik yang mendorong pemerintah desa untuk segera mengalokasikan Dana Desa guna merealisasikan perbaikan jalan yang sudah lama dibutuhkan masyarakat.

"Adanya perbaikan jalan ini karena memang tahun lalu ada Bapak Bupati yang datang langsung ke Cisanggar untuk melihat kondisi jalan di sana. Dari situlah kemudian ada rencana perbaikan jalan menggunakan Dana Desa." (Bapak Rahmat, Sekretaris Desa Ciheras, 2026)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, perbaikan jalan di Kampung Cisanggar direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2026. Penetapan jadwal pelaksanaan ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang melibatkan pemerintah desa dan aspirasi masyarakat yang telah lama menunggu realisasi perbaikan jalan tersebut.

3. Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan

Sebagai respons terhadap kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di Kampung Cisanggar, pemerintah Desa Ciheras mengalokasikan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 untuk program semenisasi jalan di tiga titik lokasi. Berdasarkan data pagu Dana Desa, kegiatan semenisasi tersebut mencakup: (1) Kampung Cinengah RT 05 RW 07 sepanjang 570 meter senilai Rp147.956.500,00; (2) Kampung Tegalsari RT 01 RW 01 sepanjang 355

meter senilai Rp150.000.000,00; dan (3) Kampung Ciburun RT 03 RW 02 sepanjang 278 meter senilai Rp118.594.700,00. Total anggaran yang dialokasikan untuk ketiga kegiatan semenisasi tersebut mencapai Rp416.551.200,00.

Penetapan tiga titik semenisasi sekaligus dalam satu tahun anggaran mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menangani permasalahan infrastruktur secara bertahap namun menyeluruh. Distribusi lokasi pembangunan yang menyebar di tiga kampung berbeda juga menunjukkan upaya pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat desa, sesuai dengan prinsip keadilan yang diamanatkan dalam pengelolaan Dana Desa.

4. *Kerangka Regulasi dan Kebijakan Nasional*

Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ciheras dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku. Landasan hukum utama mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan desa secara mandiri berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, dan efektivitas.

Di samping itu, penggunaan Dana Desa juga berpedoman pada peraturan pemerintah dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Mekanisme perencanaan Dana Desa di Desa Ciheras mengikuti prosedur yang ditetapkan, dimulai dari penyusunan RPJMDes, RKPDes, hingga penetapan APBDDes melalui musyawarah desa, sehingga setiap penggunaan anggaran memiliki dasar perencanaan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

5. *Faktor Penghambat Implementasi Dana Desa*

Dalam proses implementasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Cisanggar, ditemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, hambatan tersebut bersifat teknis dan geografis.

a. Kendala Jaringan dalam Proses Pengajuan

Hambatan pertama yang dihadapi adalah kendala jaringan internet pada saat proses pengajuan Dana Desa secara daring. Proses administrasi dan pelaporan Dana Desa yang kini dilakukan secara digital menuntut ketersediaan jaringan internet yang memadai. Namun, kondisi geografis Desa Ciheras yang berada di wilayah pedesaan menyebabkan jaringan internet kerap tidak stabil, sehingga menghambat proses pengajuan dan pelaporan Dana Desa secara tepat waktu.

"Kendalanya itu pas pengajuan Dana Desa sering terganggu oleh jaringan. Di sini jaringannya tidak selalu bagus, jadi kadang prosesnya jadi terhambat." (Bapak Rahmat, Sekretaris Desa Ciheras, 2026)

Hambatan teknis berupa keterbatasan jaringan internet ini merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh banyak desa di wilayah terpencil Indonesia. Kondisi ini memengaruhi kecepatan dan efisiensi proses administrasi Dana Desa yang semakin berbasis digital, sehingga diperlukan solusi berupa peningkatan infrastruktur jaringan telekomunikasi di wilayah perdesaan.

b. Kondisi Geografis yang Membutuhkan Upaya Ekstra

Hambatan kedua yang tidak kalah signifikan adalah kondisi geografis jalan menuju Kampung Cisanggar yang sangat menantang. Medan yang berat dan akses yang sulit menyebabkan proses pembangunan di wilayah tersebut membutuhkan upaya dan sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan pembangunan jalan di lokasi yang lebih mudah dijangkau.

"Untuk perbaikan jalan di Cisanggar itu memang dibutuhkan effort yang ekstra. Aksesnya susah, jalannya panjang, jadi tidak semudah membangun jalan di tempat lain." (Bapak Rahmat, Sekretaris Desa Ciheras, 2026)

Kondisi geografis yang menantang ini berdampak pada distribusi material bangunan yang menjadi lebih sulit dan berbiaya lebih tinggi. Kendaraan pengangkut material berpotensi tidak dapat menjangkau seluruh titik lokasi pembangunan, sehingga sebagian pengangkutan harus dilakukan secara manual

oleh tenaga kerja lokal. Hal ini memperpanjang waktu pengerjaan dan meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia di lapangan.

Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Kodoatie (2005) yang menyebutkan bahwa salah satu kendala utama pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan terpencil adalah keterbatasan aksesibilitas yang menyebabkan biaya konstruksi menjadi lebih tinggi dan waktu pelaksanaan menjadi lebih panjang dibandingkan wilayah yang mudah dijangkau.

c. Panjang Ruas Jalan yang Melebihi Kapasitas Anggaran

Hambatan ketiga adalah panjangnya ruas jalan yang memerlukan perbaikan di Kampung Cisanggar yang tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran Dana Desa dalam satu tahun anggaran. Kondisi ini menyebabkan perbaikan jalan harus dilakukan secara bertahap, dengan memprioritaskan ruas-ruas yang paling kritis terlebih dahulu, sementara ruas lainnya masih menunggu alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan anggaran merupakan permasalahan struktural yang umum terjadi di tingkat desa. Dana Desa yang diterima setiap tahun memiliki besaran yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur desa sangat beragam dan mencakup berbagai bidang, tidak hanya infrastruktur jalan saja.

6. Dampak Belum Terlaksananya Perbaikan Jalan terhadap Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa hingga saat penelitian ini dilakukan, perbaikan jalan di Kampung Cisanggar belum terealisasi dan baru akan dilaksanakan pada bulan September 2026. Kondisi jalan yang masih rusak tersebut memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Kampung Cisanggar.

a. Dampak terhadap akses kesehatan

Kondisi Jalan yang rusak dan sulit diakses menyebabkan masyarakat Kampung Cisanggar mengalami kesulitan dalam menjangkau fasilitas

kesehatan. Warga yang membutuhkan pelayanan medis, terutama dalam kondisi darurat seperti ibu melahirkan atau lansia yang sakit. Harus menempuh perjalanan yang lebih berat dan beresiko akibat kondisi jalan yang tidak memadai.

"Kendalanya itu pas pengajuan Dana Desa sering terganggu oleh jaringan. Disini jaringannya tidak selalu bagus, jadi kadang prosesnya terhambat."
(Bapak Rahmat, Sekretaris Desa Ciheras, 2026)

b. Dampak terhadap Akses Pendidikan

Kondisi jalan yang buruk juga berdampak pada aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak di Kampung Cisanggar. Anak-anak sekolah harus menempuh perjalanan yang lebih sulit dan berbahaya setiap harinya, terutama pada musim hujan ketika kondisi jalan menjadi semakin licin dan tidak aman. Kondisi ini berpotensi menurunkan semangat dan kehadiran siswa di sekolah.

c. Dampak terhadap Kegiatan Ekonomi

Dampak paling terasa dirasakan oleh masyarakat adalah pada sektor ekonomi. Petani dan pelaku usaha di Kampung Cisanggar mengalami kesulitan dalam mendistribusikan hasil pertanian dan produk usaha mereka ke pasar. Biaya transportasi yang lebih tinggi akibat medan yang berat, ditambah dengan risiko kerusakan hasil panen selama perjalanan, menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi tidak optimal.

"Yang paling terasa itu dampak ke ekonomi. Susah buat bawa hasil pertanian, biaya transportasi jadi lebih mahal karena jalannya susah. Pendidikan dan kesehatan juga terganggu." (Bapak Rahmat, Sekretaris Desa Ciheras, 2026)

Dampak-dampak tersebut menegaskan betapa pentingnya segera merealisasikan perbaikan infrastruktur jalan di Kampung Cisanggar. Kondisi jalan yang baik merupakan prasyarat dasar bagi terpenuhinya hak-hak dasar

masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sebagaimana yang menjadi tujuan utama dari program Dana Desa itu sendiri.

7. Rencana Perbaikan Jalan dan Harapan ke Depan

Meskipun terdapat berbagai hambatan dalam implementasinya, pemerintah Desa Ciheras telah menetapkan rencana konkret untuk merealisasikan perbaikan jalan di Kampung Cisanggar pada tahun 2026. Perbaikan jalan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan September 2026 dengan menggunakan alokasi Dana Desa yang telah direncanakan.

Adanya kunjungan langsung Bupati Tasikmalaya ke Kampung Cisanggar pada tahun sebelumnya menjadi momentum penting yang mempercepat proses perencanaan dan penganggaran perbaikan jalan. Perhatian dari pimpinan daerah tersebut memberikan dorongan politik yang signifikan bagi pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Cisanggar dalam alokasi Dana Desa.

"Ke depannya memang sudah ada rencana untuk perbaikan jalan di Cisanggar. Rencananya akan dilaksanakan bulan September tahun ini. Harapannya dengan adanya perbaikan jalan ini masyarakat bisa lebih mudah beraktivitas."
(Bapak Rahmat, Sekretaris Desa Ciheras, 2026)

Rencana perbaikan jalan di bulan September 2026 ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata atas permasalahan infrastruktur yang telah berlangsung lebih dari satu dekade di Kampung Cisanggar. Dengan terealisasinya perbaikan jalan tersebut, diharapkan aksesibilitas masyarakat dapat meningkat secara signifikan, sehingga berbagai hambatan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang selama ini dirasakan masyarakat dapat teratasi secara bertahap.

Keberhasilan implementasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Cisanggar nantinya tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

Pertama, implementasi Dana Desa di Desa Ciheras Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Dana Desa mengalami peningkatan dari Rp2.100.476.000,00 menjadi Rp2.140.476.000,00, dengan total alokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan melalui program semenisasi di tiga titik lokasi sebesar Rp416.551.200,00. Penggunaan Dana Desa tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan kegiatan sosial, sehingga mencerminkan pendekatan pembangunan desa yang holistik dan komprehensif.

Kedua, kondisi infrastruktur jalan di Kampung Cisanggar masih memprihatinkan. Jalan di wilayah tersebut terakhir kali diperbaiki pada tahun 2013 dan hingga saat penelitian ini dilakukan belum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Perbaikan jalan baru direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2026, setelah adanya kunjungan langsung Bupati Tasikmalaya ke lokasi tersebut yang menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Cisanggar.

Ketiga, terdapat tiga faktor penghambat utama dalam implementasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Cisanggar. Pertama, kendala jaringan internet yang menghambat proses pengajuan dan pelaporan Dana Desa secara daring. Kedua, kondisi geografis medan yang berat dan sulit diakses sehingga membutuhkan upaya dan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga, panjang ruas jalan yang membutuhkan perbaikan melebihi kapasitas anggaran Dana Desa yang tersedia dalam satu tahun anggaran, sehingga perbaikan harus dilakukan secara bertahap.

Keempat, belum terlaksananya perbaikan jalan di Kampung Cisanggar memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dalam tiga aspek. Dari aspek kesehatan, masyarakat mengalami kesulitan menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat. Dari aspek pendidikan, anak-anak sekolah harus menempuh perjalanan yang lebih sulit dan berbahaya setiap harinya. Dari aspek ekonomi, petani dan pelaku usaha mengalami hambatan dalam mendistribusikan hasil pertanian, sehingga biaya transportasi meningkat dan pendapatan masyarakat menjadi tidak optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa dan pemerintah daerah meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan telekomunikasi di wilayah perdesaan guna memperlancar proses administrasi Dana Desa secara daring. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah yang sulit dijangkau. Percepatan realisasi perbaikan jalan di Kampung Cisanggar pada bulan September 2026 diharapkan dapat segera mewujudkan peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat Desa Ciheras secara nyata dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Fakrusyi Sahkirin Hibatur Rokhman, Sri Kamariyah, and Ika Devy Pramudiana, "Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa," *RISOMA J. Ris. Sos. Hum. dan Pendidik.*, vol. 3, no. 6, pp. 274–297, 2025, doi: 10.62383/risoma.v3i6.1289.

Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi pembangunan infrastruktur desa dalam penggunaan dana desa tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.

Nurpauziah, F., Djuwita, D., & Layaman. (2025). Dampak pengelolaan dana desa melalui pembangunan infrastruktur jalan terhadap upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat: Studi pada Desa Nanggela Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon. *Journal of Sharia Accounting and Tax*, 3(1), 397–408.

Saputra, D., Sunarto, I., & Asmuni. (2024). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 6(2), 214–225.

Andris, N., Boku, Z., & Badu, R. S. (2025). Analisis efektivitas penggunaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 249–260.

Anggraini, N., Harsono, I., & Sriningsih, S. (2024). Efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–8.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.